

## **Menjaga Relevansi Profesi Pustakawan Di Era Digital: Langkah Baru Ikatan Pustakawan Indonesia**

**Retno Andini, Luki Wijayanti**

**Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia**  
**retno.andini21@ui.ac.id**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi peran Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dalam mendukung profesi pustakawan di era digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menjadikan teknik wawancara dan studi literatur dalam proses dalam pengumpulan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa IPI berperan penting dalam peningkatan kompetensi pustakawan. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) berusaha menjadi organisasi profesi yang adaptif terhadap kebutuhan pada era digital. Keterlibatan generasi muda dalam masa kepengurusan baru diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi inovasi dan kreativitas baru. IPI telah merancang program dan kegiatan dari 8 (delapan) komisi PP-IPI untuk dapat terhubung dengan pustakawan dalam upaya menjaga relevansi profesi pustakawan di era digital.

**Kata Kunci:** IPI ; organisasi pustakawan ; profesi pustakawan

### **ABSTRACT**

*This research explores the role of the Indonesian Librarians Association (IPI) in supporting the librarian profession in the digital era. The method used is descriptive qualitative by using interview techniques and literature studies in the data collection process. The results of the study show that IPI plays an important role in increasing the competence of librarians. The Indonesian Librarian Association (IPI) strives to become a professional organization that is adaptive to the needs of the digital era. It is hoped that the involvement of the younger generation in the new management period will result in new collaborative innovations and creativity. IPI has designed programs and activities from 8 (eight) PP-IPI commissions to be able to connect with librarians in an effort to maintain the relevance of the librarian profession in the digital era.*

**Keywords:** *Indonesia Librarian Organization ; librarian organization; librarian profession*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini memberikan tantangan kepada pustakawan untuk memperluas kemampuan mereka dalam mengelola informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan perpustakaan memiliki diversifikasi dengan penyesuaian dari jenis perpustakaan itu sendiri. Namun, pada dasarnya pustakawan perlu memiliki tingginya minat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem ilmu perpustakaan dan informasi, rasa tanggung jawab kepada masyarakat telah diamati melalui sifat layanan mereka, yaitu mendukung program akademik dari tingkat bawah, mendukung penelitian, mendidik orang, memberikan ketepatan informasi pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat pada paket layanan yang berbeda (Devi, 2019).

Pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi pustakawan untuk bekerja secara efektif di lingkungan digital harus mencakup tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam teknologi informasi (Gbaje, 2013). Peluang peningkatan pengetahuan dan keterampilan pustakawan dapat berasal dari organisasi tempat mereka bekerja, asosiasi profesi, dan dari organisasi eksternal yang mewadahi pelatihan dan pendidikan pustakawan. Layanan asosiasi profesional juga dapat membantu pustakawan mengembangkan keterampilan yang dapat mereka terapkan tidak hanya dalam pekerjaan layanan tetapi juga dalam aspek lain dari karir mereka (Sassen, 2023). Pustakawan menghargai asosiasi untuk peluang pengembangan profesional yang mereka sediakan. Peluang ini meliputi konferensi, lokakarya, kursus pendidikan berkelanjutan, webinar, publikasi, dan daftar diskusi (Garrison dan Cramer 2021; Hines 2014; Thomas 2012 pada Sassen, 2023).

Organisasi profesi pustakawan di Indonesia memegang peran penting dalam memberikan dukungan dan pelatihan kepada pustakawan. Salah satu organisasi profesi pustakawan yang terbesar dan tertua adalah IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia). Organisasi ini didirikan pada tahun 1973 dan

bertujuan meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan dan informasi, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara, memajukan dan memberikan perlindungan kepada anggota. Pada era digital, IPI berperan sangat penting dalam mendukung dan melatih pustakawan dalam penggunaan informasi dan penggunaan teknologi informasi yang tepat guna.

Penelitian terkait terdahulu telah dilakukan oleh Vivi Avilia, Vita Amelia, dan Hadira Latiar pada tahun 2020 dengan judul “Peran Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau Dalam Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pustakawan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa dari ketiga indikator program kerja, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Riau belum melaksanakan kegiatannya dengan baik.

Penelitian terkait lainnya berjudul “Kontribusi Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia Dalam Pengembangan Profesionalisme Pustakawan” yang dilakukan oleh Rizal Gani Kaharudin dan Ana Irhandayaningsih pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISIPII berkontribusi pada pengembangan profesionalisme pustakawan yaitu pada aspek kelembagaan, pembahasan isu strategis, kajian ilmiah, penguatan profesional, serta advokasi kebijakan dalam keilmuan perpustakaan dan informasi. Bentuk pengembangan profesionalisme yang dilakukan lebih fokus kepada intelektual pustakawan.

Penelitian terdahulu yang terakhir dilakukan oleh Shakeel Ahmad Khan dan Rubina Bhatti pada tahun 2014 dengan judul “Professional Issues and Challenges Confronted by Pakistan Library Association in the Development of Librarianship in Pakistan”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menghasilkan Asosiasi Perpustakaan Pakistan menghadapi masalah dan tantangan profesional yang serupa dengan asosiasi perpustakaan di negara berkembang lainnya.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat diketahui bahwa organisasi profesi perpustakaan dan pustakawan masih mengalami tantangan besar dalam memberikan kontribusinya bagi pengembangan profesi. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi peran Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) lebih jauh dalam menjaga relevansi profesi pustakawan di era digital.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara. Sugiono (2010) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran sentral sebagai instrumen utama, pengumpulan data melibatkan penggabungan berbagai teknik, dan analisis data bersifat deduktif. Metode pengumpulan data berupa wawancara dilakukan kepada responden untuk mendapatkan informasi secara detail dan fokus pada pemahaman, pengalaman, serta pandangan yang dimiliki oleh responden. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan lebih alami dan akurat. Setelah itu, data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik Thematic Analysis. Braun dan Clarke (2006) menyatakan bahwa Thematic Analysis adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) yang terkandung dalam data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **IPI sebagai Organisasi Profesi Pustakawan**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi profesi pustakawan, IPI memiliki visi dan misi. Visi yang dimiliki IPI adalah terwujudnya Ikatan Pustakawan Indonesia yang profesional, bersinergi, mandiri dan berdaya saing untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sedangkan misi dari IPI meliputi meningkatkan kompetensi, dan profesionalisme serta kemandirian pustakawan melalui TI dan kewirausahaan, meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral baik nasional, regional dan internasional, dan meningkatkan peranan IPI dalam mendukung program pembangunan nasional berkelanjutan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi untuk kesejahteraan.

Selama hampir 50 tahun berkiprah, IPI telah melaksanakan kongres sebanyak 15 kali. Kongres terakhir yang dilaksanakan pada 1 November 2022 di Surabaya mengusung tema “Peran Pustakawan Dalam Ekosistem Digital Nasional”. Melalui kongres ini, IPI sebagai asosiasi pustakawan terbesar di Indonesia memahami semakin tingginya tantangan bagi pustakawan dalam menghadapi era disrupsi. Kongres ini mengumpulkan sekitar 6000 peserta, termasuk pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia dari tingkat pusat dan daerah, pustakawan, pengelola perpustakaan, dosen yang mengajar ilmu perpustakaan, serta pemerhati yang memiliki minat dalam dunia pustakawan, termasuk Duta Baca Indonesia dan Duta Baca Jawa Timur. (Suharyanto, 2022). Agenda utama pada Kongres IPI yang ke-XV adalah pemilihan Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia untuk periode 2022-2025 yang menghasilkan terpilihnya Bapak Syamsul Bahri sebagai Ketum IPI.

Pada Kongres IPI, peserta dapat memberikan masukan serta saran untuk kemajuan organisasi ini. Beberapa masukan di antaranya adalah keterlibatan generasi muda sebagai pengurus maupun ketua IPI. Hal tersebut didorong dari tingginya harapan pustakawan yang merupakan anggota IPI untuk dapat merasakan perubahan melalui inovasi dan kreativitas dari generasi muda yang membuat roda organisasi menjadi dinamis. Masukan

lainnya menyentuh identitas IPI terkait kata “Ikatan” yang dianggap menciptakan ruang batas sehingga disarankan untuk menggunakan kata yang lebih mencerminkan kebersamaan.

Berselang 2 (dua) bulan setelah Kongres IPI diadakan, Kepala Perpustakaan Nasional RI mengukuhkan Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia 2022-2025, bertempat di Perpustakaan Nasional RI Jl. Merdeka Selatan. Pada kepengurusan yang baru, terjadi perputaran SDM yang melibatkan generasi muda dalam organisasi ini. Hal ini menjadi sebuah kebaruan bagi organisasi untuk mendapatkan pemikiran serta ide segar untuk mengembangkan IPI menjadi lebih bermanfaat.

Struktur pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) terdiri dari beberapa posisi, yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Sekretariat. Selain itu, terdapat 8 (delapan) komisi yang bertugas dalam berbagai bidang, yaitu Komisi I (Organisasi dan Keanggotaan), Komisi II (Kerjasama dan Hubungan Internasional), Komisi III (Humas dan Publikasi), Komisi IV (Penerbitan), Komisi V (Pengembangan Profesi, Pendidikan, dan Pelatihan), Komisi VI (Usaha Dana), Komisi VII (Advokasi, Sosialisasi, dan Pengabdian Masyarakat), serta Komisi VIII (Sertifikasi dan Akreditasi).

Setelah pelaksanaan pengukuhan Pengurus Pusat IPI 2022-2025, agenda berikutnya adalah rapat pleno terkait program kerja IPI pada masa kepengurusan baru (Suharyanto, 2023). Program kerja IPI diselaraskan mendukung program kerja pemerintah, dalam hal ini merujuk pada program kerja Perpustakaan Nasional RI. Dalam pelaksanaannya, terdapat Dewan Pengawas yang merupakan peran baru pada kepengurusan masa ini, bertugas melakukan evaluasi capaian kinerja organisasi, menyusun analisis jabatan dan mengambil tindakan untuk menemukan solusi terhadap hal yang belum tercapai serta menginformasikan kebijakan yang harus diterapkan organisasi (Suharyanto, 2022).

### **Strategi IPI Menjaga Relevansi Profesi Pustakawan**

IPI merupakan organisasi profesi yang menjadi harapan serta tumpuan

bagi para pustakawan di Indonesia. Pustakawan yang merupakan anggota maupun non anggota IPI ingin mendapatkan kebermanfaatan dari berjalannya organisasi ini melalui program-program yang dilaksanakan. Pada beberapa tahun terakhir bersamaan dengan pandemi Covid-19, IPI berusaha untuk dapat hadir di tengah pustakawan dan masyarakat luas. Hal ini ditandai dengan tetap berjalannya program kegiatan pelatihan perpustakaan sekolah, pemberian bantuan buku kepada masyarakat sedang sedang menjalankan isolasi di Wisma Atlet, serta penerbitan buku dan artikel jurnal secara konsisten sebagai bentuk kreativitas dan produktivitas anggota IPI.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ketua Komisi IV (Penerbitan) IPI, pada tahun 2023 IPI menerbitkan buku yang berjudul 50 tahun perjalanan Ikatan Pustakawan Indonesia :bunga rampai. Penerbitan buku ini memberikan kesempatan pustakawan untuk menyuarakan kesan, pesan dan opininya untuk kemajuan organisasi profesi ini. Karya ini dipublikasikan bertepatan dengan Rapat Kerja Pusat ke-24 dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia pada 27 Juli 2023. Bahasan buku ini berfokus pada kiprah yang dijalankan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia dalam konteks kepustakawanan di Indonesia.

Sementara itu, IPI juga terbuka dalam menerima artikel ilmiah yang diajukan pustakawan untuk dapat diterbitkan dua kali setahun dalam Jurnal IPI. Pustakawan juga dapat mengirimkan artikelnya untuk dapat dipublikasikan secara regular pada website IPI (<https://portal.ipi.web.id/>).

Dalam upaya meningkatkan keterhubungan dengan pustakawan, IPI membuka jalan untuk berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan atau program. Seperti pada bulan Februari 2023, IPI bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI mengadakan bincang kepustakawanan yang mengangkat judul “ChatGPT? Siapa takut!”. Dengan mengadakan kegiatan ini, menandakan IPI peka terhadap isu-isu yang sedang berkembang dalam dunia kepustakawanan. Sehingga, IPI mengharapkan pustakawan dapat tetap relevan dengan segala perubahan yang ada dengan mengindahkan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Pada kepengurusan IPI yang terdiri dari 8 (delapan) komisi, masing-masing memiliki program kerja yang diharapkan dapat memajukan organisasi serta profesi pustakawan yang bernaung di dalamnya. Pada komisi III yang mengurus kehumasan, terdapat program expose pustakawan berprestasi, pemanfaatan Radio Perpustakaan untuk menyampaikan hal-hal baru bidang Perpustakaan khususnya bagi Pengurus Pusat IPI, dan rencana penerbitan buku Peran Pustakawan di Indonesia Emas tahun 2045.

Peningkatan jaringan kepustakawanan juga perlu menjadi perhatian organisasi profesi. Komisi II IPI yang mengurus urusan Kerjasama dan Hubungan Internasional mengusulkan kerjasama aktif dengan berbagai organisasi profesi bidang Perpustakaan seperti IFLA, CONSAL, dll dalam rangka seminar, lokakarya, pengembangan profesi pustakawan serta keterlibatan aktif pustakawan di forum-forum nasional dan internasional. Sementara itu, Komisi VI IPI yang mengurus usaha & dana mengusulkan untuk membuat pendanaan mandiri, selain mendapatkan anggaran Perpustakaan. Pendanaan mandiri berupa pembangunan koperasi yang nantinya akan menghasilkan berbagai jenis produk untuk dapat dimanfaatkan dan dijual kepada anggota IPI.

Pustakawan juga bergabung dengan asosiasi profesional untuk mendukung upaya advokasi, seperti mempertahankan kebebasan intelektual, membentuk kebijakan publik, dan mendorong pendanaan pemerintah untuk perpustakaan (Cubberley 1996; Kamm 1997 pada Sassen, 2023). IPI melalui Komisi VII yang mengurus advokasi, sosialisasi dan pengabdian masyarakat diharapkan dapat menentukan posisinya di tengah masyarakat untuk berperan lebih aktif pada kemajuan profesi pustakawan. Sejalan dengan hasil wawancara penulis kepada salah satu pengurus muda IPI yang memiliki harapan agar IPI dapat membangun kembali otoritas dan kekuatan politiknya ditengah pustakawan, membuat IPI hadir ditengah tengah pustakawan dan memiliki peran yang konkret.

### **Pergeseran Peran Pustakawan**

Peran pustakawan secara alami bergeser seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam tuntutan masyarakat terhadap akses informasi. Peran pustakawan tidak hanya terbatas pada pengelolaan koleksi, namun juga dapat meluas pada peran sebagai menjadi mentor, fasilitator, motivator, bahkan pemberi inspirasi dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter, dan kerja sama tim yang dibutuhkan di masa depan seperti yang dipaparkan pada Kongres ke XV IPI. Untuk mencapai peran tersebut, pustakawan perlu memiliki minat perubahan dengan dukungan peningkatan kompetensi dari lembaga dan tentunya organisasi profesi. Kompetensi digunakan untuk berfokus pada orang yang melakukan pekerjaan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses, bukan pekerjaan itu sendiri. Ini berarti bahwa faktor kognitif (pengetahuan), [serta] perilaku dan afektif (perasaan) semuanya bekerja dalam suatu kompetensi (Bryant dan Poustie, 2001).

Kepala Perpustakaan Nasional RI dalam kegiatan Kongres ke XV Ikatan Pustakawan Indonesia dan Seminar Nasional Indonesia menyampaikan inovasi yang telah dilakukan Perpustakaan Nasional RI dalam menyiapkan konten-konten digital untuk layanan perpustakaan dan menyiapkan SDM yang bertalenta digital sehingga bisa menjadi konten kreator. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam paparannya saat Kongres IPI mengharapkan pustakawan memiliki daya cipta berupa visi, kehendak, karakter personal yang akan membawa makna baru dan secara mendasar mengubah kehidupan bagi diri dan lingkungan maupun dunia. Sosok pustakawan juga sebagai sosok Game Changer yang memiliki karakter IKI (inisiatif, kolaborasi, dan inovasi) (Suharyanto, 2022).

Pada era digital, kemampuan dalam mengakses, mengelola, dan menciptakan informasi dalam bentuk format tercetak dan digital menjadi suatu hal dasar yang perlu dimiliki pustakawan. Adanya jejaring sosial berbasis teknologi mendorong pustakawan untuk dapat memanfaatkannya

dengan baik dan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemampuan pustakawan dalam memanfaatkan media sosial dengan baik erat kaitannya dengan kemampuannya dalam berliterasi digital. Apabila pustakawan dapat mengemas aktivitas berliterasi digitalnya dengan baik, diharapkan hal ini dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama.

Pustakawan sebagai penyedia layanan di perpustakaan juga perlu menciptakan inovasi layanan untuk merespons disrupsi digital. Perubahan ini juga didorong dengan terjadi pandemi Covid-19 yang merevolusi jenis layanan konvensional untuk berubah menjadi layanan digital agar tetap dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam jangka panjang, pustakawan perlu terus berupaya untuk menciptakan strategi dan sistem yang cocok dengan kondisi era digital.

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI, jumlah fungsional pustakawan per 8 September 2023 sebanyak 5.386 orang yang tersebar pada perpustakaan umum, Perpustakaan RI, perpustakaan badan (tingkat provinsi), perpustakaan khusus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Tingkatan jabatan pustakawan beragam dari pustakawan pelaksana, pustakawan pelaksana lanjutan, pustakawan penyelia, pustakawan ahli pertama, pustakawan ahli muda, pustakawan ahli madya, dan pustakawan ahli utama. Data ini menggambarkan adanya kebutuhan yang besar bagi pustakawan dalam mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan perbedaan jenis perpustakaan dan jabatan fungsional.

Jabatan fungsional pustakawan saat ini memiliki kewajiban untuk tergabung dalam organisasi profesi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, pada Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap JF yang telah ditetapkan harus memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF. (2) Setiap Pejabat Fungsional harus menjadi anggota organisasi profesi JF. Adanya peraturan ini tentunya mendorong IPI untuk menyiapkan organisasi profesi yang dapat menaungi banyaknya anggota baru yang memiliki harapan atas peningkatan kompetensi profesinya setelah bergabung dalam IPI.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dalam berupaya menjadi organisasi profesi yang adaptif terhadap kebutuhan pada era digital, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menjalankan beberapa program kerja. Beberapa kegiatan seperti pelatihan dan bincang kepustakawanan telah dilakukan serta mendapat respon yang baik dari pustakawan anggota maupun non-anggota IPI. Dalam organisasi, IPI melibatkan generasi muda dalam masa kepengurusan baru untuk dapat berkolaborasi menghasilkan inovasi dan kreativitas baru. Pergeseran peran pustakawan membutuhkan dukungan IPI dalam upaya peningkatan kompetensi. IPI telah merancang program dan kegiatan dari 8 (delapan) komisi PP-IPI untuk dapat terhubung dengan pustakawan dalam upaya menjaga relevansi profesi pustakawan di era digital.

IPI perlu memperkuat program kerja yang telah dirancang dengan adanya beberapa Komisi seperti Komisi II (Kerjasama dan Hubungan Internasional) yang diharapkan dapat membangun kolaborasi dan jaringan untuk memperkaya kompetensi pustakawan di Indonesia. Selain itu Komisi III (Humas dan Publikasi) juga memegang peran besar dalam menggaungkan IPI melalui website dan media lainnya yang dapat dioptimalkan. Konsistensi IPI dan dukungan aktif dari anggotanya dalam upaya pengembangan organisasi profesi ini akan memberikan keyakinan kepada pustakawan Indonesia bahwa profesi mereka akan tetap relevan di era digital.

### DAFTAR PUSTAKA

- Avilia, V., Amelia, V., Latiar, H. 2020. *PERAN IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA (IPI) PROVINSI RIAU DALAM MENGEMBANGKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PUSTAKAWAN*. Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 15(1), 115–130. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/FIHRIS/article/view/1708/871>
- Braun and Clark. (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology". *Journal of Qualitative Research in Psychology*. 3, 77-101. Diakses dari <http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Bryant, J. and Poustie, K. (2001), "Competencies needed by public library staff", Bertelsmann Foundation, Gütersloh, available at: <http://uflibjobcompetencies.pbworks.com/f/PubpLibpComp.pdf> (accessed 25 January 2023).
- Devi, K. S. (2019). Role of Library Professional Association in Enhancing Information Literacy Programme. *International Journal of Library and Information Services*, 8(1), 41–48. <https://doi.org/10.4018/ijlis.2019010104>
- Gbaje, E. S. (2013). Re-training of librarians for the digital work environment by the Nigerian Library Association. *IFLA Journal*, 39(1), 30–36. <https://doi.org/10.1177/0340035212472957>
- Kaharudin, R. G., Irhandayaningsih, A. 2019. KONTRIBUSI IKATAN SARJANA ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN PROFESIONALISME PUSTAKAWAN. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(4), 140–149.
- Menpan RB. (2023). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional
- Khan, S. A., Bhatti, R. (2014). Professional Issues and Challenges Confronted by Pakistan Library Association in the Development of Librarianship in Pakistan. *In Chinese Librarianship: an International Electronic Journal*
- Perpustakaan Nasional RI. (2023). STATISTIK PUSTAKAWAN SEPTEMBER 2023 PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN PNRI. [https://pustakawan.perpusnas.go.id/statistik-all-detil?mode=monthly&option=stat&stat\\_month=9&stat\\_year=2023](https://pustakawan.perpusnas.go.id/statistik-all-detil?mode=monthly&option=stat&stat_month=9&stat_year=2023)
- Sassen. (2023). A beginner's guide to library association service, College & Undergraduate Libraries, DOI: [10.1080/10691316.2023.2204482](https://doi.org/10.1080/10691316.2023.2204482)
- Sugiono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharyanto. (2023). Kepala Perpustakaan Nasional RI Kukuhkan Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia 2022-2025. <https://www.kompasiana.com/mallawa/63d2840e96b68008544e1742/kepala-perpustakaan-nasional-ri-kukuhkan-pengurus-pusat-ikatan-pustakawan-indonesia-2022-2025>
- Suharyanto. (2023). Mengenal Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, 2022-2025.

<https://www.kompasiana.com/mallawa/63d34cd9df78f24c2f67c552/mengenai-pengurus-pusat-ikatan-pustakawan-indonesia-2022-2025>

Suharyanto. (2023). Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia 2022-2023.

<https://www.kompasiana.com/mallawa/641b95684addee3bac35a422/rapat-pleno-pengurus-pusat-ikatan-pustakawan-indonesia-2022-2023>

Suharyanto. (2022). Kongres ke-XV Ikatan Pustakawan Indonesia Resmi Dibuka.

<https://www.kompasiana.com/mallawa/63619e4b4addee42027912d2/kongres-ke-xv-ikatan-pustakawan-indonesia-resmi-dibuka>